

PERLINDUNGAN HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM SURROGATE MOTHER

Sista Noor Elvina
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: noorelvinasista@yahoo.com

Abstract:

Legal debate on Surrogate mother makes the practice can not be done in Indonesia. Surrogate mother is not an attempt pregnancy which is regulated in the Law on Health and Regulations the Minister of Health, and also not eligible the requirements of treaty in article 1320 BW. However, continue the generation is a human rights regulating in the constitution as well as national and international human rights instruments. The research was conducted by using the normative method. The results concluded that the Law on Health and Regulations the Minister of Health related to the surrogate mother are contrary to the constitution and laws of human rights related to the right to continue the generation, and surrogate mother has fulfilled all the requirements of treaty in article 1320 BW.

Keywords: Surrogate mother, Human rights.

Abstraksi:

Adanya pertentangan hukum mengenai *surrogate mother* membuat perjanjian ini tidak dapat dilakukan di Indonesia. *Surrogate mother* bukan merupakan upaya kehamilan di luar cara alamiah yang diatur di dalam Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta dianggap tidak memenuhi syarat objektif pada pasal 1320 BW. Namun, melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia yang telah diatur keberadaannya di dalam konstitusi serta instrumen HAM nasional dan internasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan *surrogate mother* adalah bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang HAM terkait hak untuk melanjutkan keturunan, serta *surrogate mother* telah memenuhi semua syarat objektif perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 BW.

Kata kunci: *Surrogate mother*, Hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

*“Banyak anak; banyak peduli. Tidak ada anak; tidak ada kebahagiaan.”*¹

Itulah yang diungkapkan oleh Christian Nevell Bovee, seorang penulis berkebangsaan Amerika dalam menggambarkan peran anak di dalam sebuah keluarga. Namun adakalanya di dalam suatu perkawinan terdapat permasalahan

¹ Jackson Brown, *A Book Of Love For My Son*, Rutledge Hill Press, Nashville, 2001, hal. 28.

dimana pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan disebabkan kondisi istri yang menderita suatu penyakit tertentu, yang mengharuskan untuk menjalani operasi pengangkatan rahim (histerektomi). Kekhawatiran yang muncul dengan histerektomi salah satunya adalah hilangnya kemampuan untuk memiliki keturunan.² Pada kondisi seperti ini, seorang wanita masih dapat memproduksi sel telur. Namun ia harus kehilangan rahimnya, sehingga dapat dipastikan ia tidak dapat lagi mengandung karena tempat berkembangnya janin sudah tidak ada. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya *surrogate mother* sebagai upaya untuk memperoleh keturunan.

Surrogate mother merupakan perluasan dari metode bayi tabung yang dikenal sebagai perjanjian sewa rahim, yaitu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat.³ Kasus ini pernah terjadi di Mimika, Papua. Pada tahun 2004, seorang wanita bernama S didiagnosa oleh dokter bahwa ia tidak bisa hamil karena kandungannya terinfeksi parah. Menurut adat suku Key, bila pasangan menikah belum dikaruniai anak, maka suami harus menceraikan istrinya. S dan B lalu memutuskan untuk melakukan program bayi tabung pada sebuah rumah sakit di Surabaya, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa S tidak bisa hamil. Sebelumnya dokter yang memeriksa telah menjelaskan bahwa program bayi tabung dapat juga dilakukan dengan menanam hasil pembuahannya pada rahim wanita lain. Cara ini dilakukan oleh S dan B dengan bantuan dari M, yang merupakan adik dari S dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.⁴

Surrogate mother bukan merupakan upaya kehamilan di luar cara alamiah yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

² Evelyn Billings, *et.al.*, **Metode Ovulasi Billings**, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2006, hal. 179.

³ Desriza Ratman, **Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal. 35-36.

⁴ Agnes Sri Rahayu, **Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Telah diuji pada 25 Oktober 2009, hal. 87-88.

(selanjutnya disebut UUK) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (selanjutnya disebut PMK). Terlebih perjanjian ini dianggap tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian terkait dengan objek dan *causa* yang halal.

Namun di sisi lain, melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai pemenuhan atas fungsi pranata keluarga. Hak ini diatur antara lain pada pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI), pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), pasal 2 piagam HAM Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dengan demikian, negara wajib menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Adanya pertentangan hukum mengenai hal tersebut, dirasa perlu untuk mengupayakan suatu perlindungan hak bagi pasangan suami istri agar dapat melakukan *surrogate mother* sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan yang merupakan hak asasi bagi setiap orang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam menjamin hak untuk melanjutkan keturunan?
2. Bagaimana meletakkan jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* pada suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 BW?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan hak asasi manusia dalam menjamin hak untuk melanjutkan keturunan.

2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menemukan jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* pada suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 BW.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal untuk menafsirkan undang-undang dan interpretasi analogi yang dilakukan dengan cara memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan undang-undang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan HAM dalam menjamin hak untuk melanjutkan keturunan

A.1. Jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam hukum HAM internasional.

Melanjutkan keturunan di dalam perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diatur di dalam pasal 16 ayat (1) DUHAM:

Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan perceraian.

Berdasarkan ketentuan diatas, berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk melanjutkan keturunan dan membentuk suatu keluarga di dalam perkawinan. Pasal 16 ayat (3) DUHAM menerangkan bahwa, "*Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan negara.*" Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara wajib mengakui dan memberikan perlindungan kepada keluarga mulai dari tahap pembentukannya.

Konvensi Wina dan Program Aksi tahun 1993, menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak tersebut.

Kewajiban negara tersebut meliputi tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktik yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Sebagai tindak lanjut dari DUHAM, pasal 23 ayat (2) ICCPR mengakui hak laki-laki dan perempuan yang berada di dalam usia perkawinan untuk menikah, termasuk menjamin kebebasan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak membentuk keluarga pada dasarnya menyatakan tentang kemungkinan untuk melahirkan anak-anak dan hidup bersama tanpa perlakuan diskriminasi maupun pembedaan dalam bentuk apapun.⁵

Di samping itu, Indonesia sebagai negara peratifikasi ICCPR mengemban kewajiban yang harus dipenuhi termasuk melarang segala bentuk diskriminasi sebagaimana yang diatur di dalam bagian II ICCPR, sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- (2) Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam kovenan ini, untuk menetapkan

⁵ Komentar Umum 19 ICCPR Paragraf 5.

perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.

Pasal 3

Negara pihak kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam kovenan ini.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 26 mencerminkan prinsip non-diskriminasi terkait kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama. Oleh karena itu ICCPR mewajibkan setiap negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang termuat di dalam kovenan bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan menjadi subjek yurisdiksinya tanpa membedakan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul sosial atau kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya.⁶ Prinsip nondiskriminasi ini juga tercermin di dalam pasal 3 ICCPR yang mewajibkan negara untuk menjamin persamaan penikmatan hak sipil politik bagi laki-laki dan perempuan.⁷

Terhadap masyarakat yang mengalami diskriminasi karena mempunyai kondisi-konsisi yang khusus, kovenan mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah afirmatif untuk mengurangi atau menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan diskriminasi yang dilarang oleh kovenan. Selain itu kovenan mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah afirmatif bagi masyarakat untuk mengurangi atau menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan diskriminasi yang dilarang oleh kovenan. Tindakan seperti itu dapat mencakup pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat yang

⁶ Komentar umum 18 ICCPR Paragraf 1.

⁷ Komentar umum 31 ICCPR Paragraf 5.

mengalami diskriminasi tersebut dalam bidang tertentu dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat lainnya.⁸

Menurut pandangan Komite HAM (*Human Rights Comitee*) PBB, pasal 26 tidak hanya menduplikasi jaminan yang disediakan oleh pasal 2, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban negara-negara pihak dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, ketika suatu negara membuat suatu peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal 26, yaitu bahwa isi peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bersifat diskriminatif.⁹

Selain itu kebebasan setiap orang untuk membentuk keluarga juga diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), sebagai berikut;

Pasal 10

- (1) Negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

Jaminan terhadap hak tersebut direfleksikan di dalam ketentuan kovenan sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur di dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 3

Negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tercantum dalam kovenan ini.

⁸ Komentar Umum 18 ICCPR Paragraf 10.

⁹ Komentar umum 18 Paragraf 12.

Pasal 5

- (1) Tidak ada satu hal pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam kovenan ini.
- (2) Tidak ada satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan diterima, dengan alasan bahwa kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

Dimensi kontraktual dari kovenan-kovenan tersebut menentukan bahwa setiap negara pihak pada perjanjian untuk mentaati kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian. Sesuai dengan prinsip yang dinyatakan pada pasal 26 Konvensi Wina 23 Mei 1969 tentang Hukum Perjanjian, *“negara-negara pihak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan konvensi dengan itikad baik (pacta sunt servanda)”*. Lebih lanjut ketentuan pasal 27 menegaskan bahwa *“suatu negara pihak tidak dapat menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum nasionalnya sebagai alasan atas kegagalannya dalam melaksanakan perjanjian”*.

Dengan demikian maka kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara baik dalam pengaturan maupun pelaksanaan harus mendukung pemenuhan HAM.

A.2. Jaminan hak untuk melanjutkan keturunan di dalam konstitusi

Sebagai wujud penghormatan atas HAM, UUDNRI 1945 telah mengamankan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu dari HAM tersebut ialah hak untuk melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1), yaitu:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Artinya, setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Suatu tindakan

diskriminatif yang dapat membatasi pemenuhan hak tersebut tidak dapat dibenarkan.

Di dalam ketentuan pasal 28I ayat (2) UUD, negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagai jaminan atas HAM. Berdasarkan prinsip tanggung jawab (*principle of responsibility*), negara perlu mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negaranya. Tanggung jawab negara di dalam penegakan HAM, diatur secara jelas di dalam konstitusi sebagai berikut:

Pasal 28I

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

A.3. Jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam hukum HAM nasional

Dalam rangka menjalankan amanat UUDNRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM yang mana pada pasal 2 lampiran piagam HAM menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*”

Di dalam ketentuan pasal 1 Tap MPR tersebut menyatakan bahwa lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah ditugaskan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Ketentuan pasal 43 Piagam HAM memberikan jaminan terhadap perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Lebih lanjut pada pasal 44 menegaskan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip hukum yang demokratis, maka dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan.

UU HAM tak luput mengatur kebebasan warga negara untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 sebagai berikut,

- (1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Komitmen pemenuhan HAM ini direfleksikan ke dalam beberapa ketentuan di dalam UU HAM, sebagai berikut:

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dengan demikian, hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga merupakan HAM yang telah diakui keberadaannya di dalam hukum internasional dan hukum nasional. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) nya bagi setiap warga negara.

B. Jaminan terhadap hak untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* yang tunduk pada ketentuan pasal 1320 BW.

B.1. Arti penting keturunan dalam sebuah ikatan perkawinan

Hadirnya seorang anak dirasa begitu penting di dalam suatu perkawinan. Bahkan ketidakmampuan seorang istri untuk memberikan keturunan dapat dijadikan dasar untuk menikah lagi atau bercerai. Di dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lebih lanjut, seorang suami dapat menceraikan istrinya karena alasan tidak

dapat memberikan keturunan. Ketentuan ini memang tidak diatur secara jelas di dalam UUP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.

Namun di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg., majelis hakim mengabulkan permohonan suami sebagai pemohon untuk bercerai dengan istrinya sebagai termohon. Di dalam duduk perkara, dikatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon belum memberikan keturunan.

Dengan demikian, pada praktiknya hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian. Hakim dapat mempertimbangkan bahwa hal tersebut dapat menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran di dalam keluarga. Dengan kata lain, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki keturunan untuk menjaga keharmonisan berumah tangga.

B.2. *Surrogate mother* dalam perspektif pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian

Menurut pasal 1313 BW, “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 BW yang terdiri dari: (i) sepakat, (ii) cakap, (iii) suatu hal tertentu, dan (iv) *causa* yang halal.

Untuk dapat melakukan *surrogate mother* secara sah, maka para pihak harus memenuhi baik syarat subjektif maupun objektif di dalam ketentuan pasal 1320 BW. Syarat sepakat dan cakap dapat terpenuhi apabila perjanjian sudah disepakati oleh para pihak yang cakap menurut hukum, dimana para pihak bukan merupakan orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan. Persoalan lain terkait keabsahan *surrogate mother* adalah mengenai syarat objektif berupa objek dan *causa* yang halal.

Suatu objek perjanjian dapat ditentukan dari jenis prestasi yang akan dilakukan. Pasal 1234 BW menentukan macam-macam prestasi di dalam sebuah perikatan, yakni untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau

untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, wujud sebuah prestasi dapat berupa barang maupun jasa. Berdasarkan pengertian dari *surrogate mother*, prestasi yang diberikan adalah berupa jasa untuk mengandung, melahirkan, dan kemudian menyerahkan bayi yang dikandung kepada orangtua biologis. Atau dengan kata lain, objek dari perjanjian ini adalah berupa jasa.

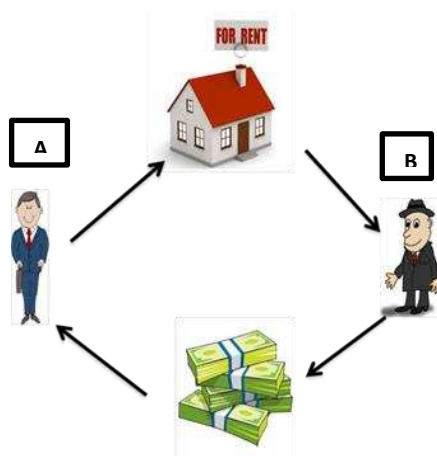
Dalam hal ini, penggunaan kata sewa rahim sebagai terjemahan dari *surrogate mother* adalah tidak tepat. Jika melihat pada konstruksi perjanjian, *surrogate mother* tidak ada kaitannya dengan perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1548 tentang perjanjian sewa menyewa menjelaskan bahwa:

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

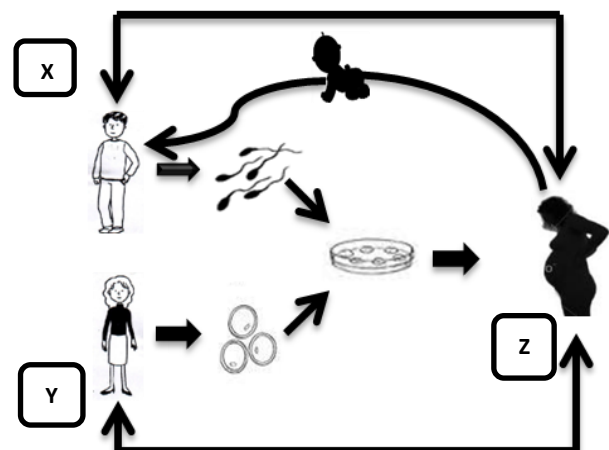
Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dilihat unsur pokok dari perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa kewajiban salah satu pihak adalah menyerahkan barang untuk dinikmati oleh pihak lain. Kemudian pihak lain memiliki kewajiban untuk membayar harga sewa. Dengan kata lain, terjadi penyerahan kekuasaan kepada orang lain atas barang yang disewa. Jika ketentuan pasal tersebut diterapkan di dalam konstruksi perjanjian sewa rahim, akan menimbulkan kekaburan mengenai barang apa yang disewakan.

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan antara perjanjian sewa menyewa dan *surrogate mother*, dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar 1 Skema perjanjian sewa menyewa rumah



Gambar 2 Skema *surrogate mother*



Gambar 1 merupakan skema perjanjian sewa menyewa dengan objeknya berupa rumah. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pemilik (**A**) sepakat untuk menyewakan rumahnya kepada pihak penyewa (**B**) dengan jangka waktu dan harga yang telah disepakati. Dari skema tersebut dapat dilihat unsur pokok dari perjanjian tersebut adalah rumah sebagai objek dan ada harga yang disepakati. Dari kedua unsur pokok tersebut lebih lanjut dapat ditentukan mengenai penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), serta daluarsa (*verjaring*) dari objek perjanjian.

Penguasaan (*bezit*) objek dari gambar 1 dipegang oleh penyewa sebagai pemegang hak (*bezitter*), yang diberikan secara langsung (*levering*) dari pemilik berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Daluarsa (*verjaring*) dari perjanjian tersebut dengan kata lain adalah jangka waktu dari penyewaan rumah tersebut. Sebuah rumah sebagai objek perjanjian, dapat dilakukan pembebanan oleh pemilik sesuai dengan jenis bendanya, yakni hipotik sebagai benda tidak bergerak.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang terdapat pada gambar 2. Dari skema tersebut dapat dilihat dimana suami istri (**X** dan **Y**) melakukan pembuahan diluar cara alamiah dengan menggunakan metode bayi tabung. Kemudian hasil pembuahan tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti (**Z**), dimana ia akan mengandung dan melahirkan hasil pembuahan tersebut. Ketika ibu pengganti sudah melahirkan bayi yang dikandungnya, maka ia harus menyerahkan bayi yang telah dikandungnya kepada suami istri tersebut.

Pada skema *surrogate mother*, perjanjian ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian sewa menyewa karena tidak terdapat dua unsur pokok dari perjanjian sewa menyewa, yakni objek yang berupa benda serta harga. Objek dari perjanjian ini tidak dapat merujuk kepada rahim, sebab tidak dapat ditentukan perihal penyerahan, pembebanan, dan daluarsa dari objek tersebut. Dengan kata lain, perjanjian ini tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian sewa rahim maupun sewa menyewa rahim. Berikut merupakan tabel perbandingan antara perjanjian sewa menyewa dan *surrogate mother*.

Tabel 4.1.

Perbandingan perjanjian sewa menyewa dan *surrogate mother*.

	Sewa menyewa	<i>Surrogate mother</i>
Jenis Prestasi	Memberikan sesuatu	Berbuat sesuatu
Objek	Rumah	Jasa
Penguasaan	Penyewa	x
Penyerahan	Langsung	x
Pembebanan	Hipotik	x
Daluarsa	Berdasarkan kontrak	x

Secara terminologi, kata “*surrogate*” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti wakil; pengganti; atau wali.¹⁰ Oleh karena itu, *surrogate mother* lebih tepat dikatakan sebagai perjanjian jasa ibu pengganti.

Polemik lain terkait *surrogate mother* adalah mengenai *causa* yang halal. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *causa* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.¹¹ Jika *causa* diartikan sebagai tujuan dari sebuah perjanjian, maka tujuan dari *surrogate mother* adalah untuk memperoleh keturunan. Pasal 1337 BW menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-undang yang terkait dengan praktik *surrogate mother* adalah UUK. Menurut ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, upaya kehamilan di luar cara alamiah dapat dilakukan dengan menggunakan metode bayi tabung, dimana hasil pembuahan harus ditanamkan di dalam rahim dari mana sel telur berasal. Jika ditafsirkan secara gramatikal, di dalam ketentuan pasal tersebut terdapat suatu kontradiksi norma. Dikatakan bahwa undang-undang mengakui adanya suatu kondisi di mana pasangan suami istri sewaktu-waktu dapat membutuhkan suatu upaya kehamilan di luar cara alamiah. Tetapi ketentuan “*ditanamkan di dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal*”, justru menuntut adanya suatu kondisi alamiah bagi seorang wanita untuk dapat mengandung. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan pengaturan

¹⁰ John M. Echols, *et.al.* **Kamus Inggris Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 571.

¹¹ Salim H.S., **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 34.

terhadap kondisi tertentu dengan syarat yang ditetapkan. Jika undang-undang mengakui ada orang yang memiliki kondisi tertentu, seharusnya undang-undang memberikan perlakuan yang berbedadari kebanyakan orang. Ketentuan ini jelas tidak dapat diterapkan kepada seorang wanita yang telah kehilangan rahim akibat suatu penyakit.

Selain itu terdapat kekurangan norma yang termuat di dalam PMK. Ketentuan pasal 2 ayat (3) menerangkan bahwa "*Pelayanan teknologi reproduksi berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.*" Artinya, upaya medis melalui metode fertilisasi in-vitro dan pemindahan embrio (PIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara yang mutakhir diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan kehamilan dengan didasarkan pada suatu indikasi medik. Indikasi medik yang dimaksud di dalam peraturan ini meliputi: (a) hanya faktor tuba; (b) faktor lain pada wanita selain tuba; (c) faktor pria; (d) banyak faktor; (e) faktor tidak diketahui.

Ketentuan mengenai kualifikasi indikasi medik pada huruf (b), (c), (d), dan (e) tidak dijelaskan apa saja dan sejauh mana kualifikasi mengenai hal tersebut. Jika melihat pada kasus histerektomi, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu indikasi medik. Bila dilakukan penafsiran secara ekstensif, histerektomi juga merupakan indikasi medik yang dimaksud dalam ketentuan PMK. Hanya saja ketentuan di dalam PMK tidak memberikan kesempatan untuk dilakukannya praktik *surrogate mother*. Atau dengan kata lain terdapat kekosongan norma di dalam ketentuan PMK.

Adanya kontradiksi dan kekosongan norma dalam peraturan terkait menyebabkan timbulnya berbagai macam penafsiran sehingga berakibat pada kesulitan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis dari penafsiran kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap suami istri yang memiliki kondisi yang tidak biasa (*unusual condition*) yang disebabkan karena suatu alasan medis. Oleh karena itu, *causa* yang terlarang tidak bisa mengacu kepada ketentuan UUK dan PMK.

Ketentuan selanjutnya terkait *causa* yang dilarang adalah apabila bertentangan dengan kesusilaan. Dalam Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 169-K/PM.III-12/AD/VII/2012, majelis hakim memberikan rumusan tentang perbuatan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Rumusan kesusilaan secara detail dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor: PUT-09-K/PM I-07 AD/III/2011 yang merumuskan pengertian kesusilaan yakni perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan/sopan santun dan keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu yang lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya misalnya seperti meraba-raba buah dada seorang perempuan, meraba-raba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan, dan lain sebagainya.¹²

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menentukan jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan yang termuat di dalam pasal 35, antara lain (a) pelacur; (b) penari erotis; (c) milisi atau tentara bayaran; dan (d) jabatan atau pekerjaan yang dilarang di negara penerima.¹³ Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat makna kesusilaan berkaitan dengan segala hal yang dapat membangkitkan nafsu birahi, sesuatu yang berhubungan dengan prostitusi, atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral.

Dalam hubungan ini, jika makna kesusilaan tersebut dikaitkan dengan *surrogate mother*, hal ini ada tidak kaitannya sama sekali. *Surrogate mother* bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang lain maupun suatu bentuk prostitusi. Praktik ini memanfaatkan kecanggihan teknologi di bidang kedokteran, sehingga tidak memerlukan kontak fisik antara suami-istri dengan ibu pengganti. Dengan demikian, *causa*

¹² Aries Harianto, **Ringkasan Disertasi: Makna “Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja”**, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal. 84

¹³ Ibid, hal. 82.

dari *surrogate mother* adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak terdapat unsur perbuatan yang amoral.

Selanjutnya terkait dengan *causa* terlarang apabila bertentangan dengan ketertiban umum. Pengertian ketertiban umum tidak dijelaskan di dalam BW, peraturan perundang-undangan, maupun yurisprudensi, sehingga tidak ada batasan yang umum mengenai hal tersebut. Menurut ketentuan dalam Prinsip Siracusa tentang Pembatasan Hak-hak Sipil dan Politik (*Siracusa Principle on the Limitation and Derogation of Provision in the International Covenant on Civil and Political Rights 1984*), ketertiban umum dapat diartikan sebagai sejumlah aturan yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat atau seperangkat prinsip-prinsip dasar yang dianut masyarakat. Menghormati hak asasi manusia merupakan bagian dari ketertiban umum. *Surrogate mother* merupakan salah satu upaya seseorang untuk dapat memenuhi hak asasi manusianya untuk melanjutkan keturunan ditengah keterbatasan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, *surrogate mother* tidak dapat dikatakan melanggar ketertiban umum.

Dengan demikian, *surrogate mother* telah memenuhi semua syarat sah perjanjian yang diatur di dalam ketentuan pasal 1320 BW, sehingga perjanjian ini adalah sah serta memiliki dasar hukum perjanjian yang jelas.

B.4. Jaminan HAM terhadap perjanjian *surrogate mother* untuk melanjutkan keturunan.

Melanjutkan keturunan untuk membentuk keluarga di dalam perkawinan yang sah telah diatur sebagai hak asasi manusia yang dijunjung tinggi keberadaannya oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sebagai wujud penghormatan atas eksistensi hak tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memuat ketentuan dan perlindungan untuk menjamin kelangsungan hak tersebut di dalam DUHAM, serta ditindaklanjuti ke dalam kovenan ICCPR dan ICESCR. Hampir semua negara di dunia ini mengakui HAM sebagai bagian hakiki dari konstitusi mereka, tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang telah mengadopsi DUHAM ke dalam konstitusi dan meratifikasi berbagai kovenan HAM internasional, pemerintah berkewajiban untuk mengakui dan mendukung di dalam pemenuhan HAM.

Salah satu bentuk dukungan negara terhadap eksistensi HAM adalah memberikan perlindungan di dalam pemenuhan HAM setiap warga negara. Perlindungan ini harus diberikan dengan peraturan hukum agar pemenuhannya bisa dipaksakan. Di dalam upaya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga, perlindungan HAM juga diperlukan termasuk di dalam upayanya melakukan *surrogate mother*. Beberapa asumsi yang menyatakan bahwa *surrogate mother* tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan syarat objektif perjanjian, secara normatif tidak terbukti. Di dalam konteks hukum perjanjian, *surrogate mother* telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 BW. Hanya saja terdapat pembatasan terhadap perjanjian ini di dalam hukum publik, yakni ketentuan di dalam UUK dan PMK.

Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum, sebaliknya hukum privat hanya mengatur hubungan antar subjek hukum. Apabila terjadi pertentangan antar keduanya, hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Dalam kasus *surrogate mother*, jika UUK dan PMK sebagai hukum publik lebih diutamakan dan mengesampingkan pasal 1320 BW sebagai hukum privat, maka hal ini dapat berpotensi menimbulkan kerusakan dalam prinsip-prinsip HAM, terutama prinsip non-diskriminasi. Hal ini disebabkan karena UUK dan PMK memiliki kontradiksi dan kekosongan norma di dalam ketentuannya berkaitan dengan upaya kehamilan di luar cara alamiah yang berpotensi menimbulkan perlakuan yang dapat menghambat pemenuhan hak untuk melanjutkan keturunan bagi orang-orang yang memiliki kondisi yang tidak biasa.

Berdasarkan analisis mengenai kedua peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua peraturan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang, terutama orang-orang yang memiliki kondisi khusus (*unusual condition*), atau dengan kata lain kelompok rentan.

Perlindungan hak secara khusus sudah diatur di dalam komentar umum 18 ICCPR. Negara dapat mengambil langkah afirmatif (diskriminasi positif) untuk mengurangi atau menghapuskan kondisi yang menyebabkan perlakuan

diskriminatif yang dilarang oleh kovenan. Tindakan tersebut dapat mencakup pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat yang berbeda dengan kebanyakan penduduk lainnya, dalam hal ini kelompok rentan.

Berkaitan dengan hal tersebut, melakukan *surrogate mother* untuk memperoleh keturunan yang dilatarbelakangi karena adanya keterbatasan kondisi yang disebabkan atas alasan medis adalah wajar. Karena hal tersebut menyebabkan suatu kondisi yang tidak memungkinkan seorang wanita untuk mengandung. Kehilangan fungsi dari salah satu organ tubuh manusia tidak berarti menghilangkan eksistensi seseorang sebagai manusia. Sebagai orang yang memiliki kondisi yang tidak biasa, mereka berhak atas suatu perlindungan khusus yang diberikan oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan memberikan jaminan HAM terhadap upaya untuk melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* ke dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan.

Di samping itu, ketentuan UUK yang membatasi hak seseorang untuk melakukan *surrogate mother* secara hierarki vertikal bertentangan dengan konstitusi, dan secara horizontal bertentangan dengan UU HAM beserta instrumen HAM lainnya. Oleh karena itu, ketentuan yang membatasi seseorang untuk melakukan *surrogate mother* sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan perlu untuk dikritisi lebih lanjut dengan alasan:

- a. Indonesia memiliki instrumen HAM nasional beserta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Konsekuensinya negara wajib menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) keberlangsungannya setiap orang. Tetapi pada kenyataannya negara justru membatasi.
- b. Hak atas kebebasan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga di dalam perkawinan yang sah merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara di dalam pasal 28B ayat (1) UUDNRI 1945, pasal 2 Tap MPR, dan pasal 10 ayat (1) UU HAM. Selain itu hak ini turut diatur didalam konvensi internasional yang telah diratifikasi, yaitu pasal 16 ayat (1) DUHAM, pasal 23 ayat (1) ICCPR, dan pasal 10 ayat (1) ICESCR.
- c. Melanjutkan keturunan dalam *surrogate mother* yang dilakukan karena

alasan medis merupakan tindakan yang dapat diterima baik secara medis maupun hukum. Karena hal tersebut telah menyebabkan suatu kondisi dimana seorang istri tidak mampu untuk mengemban tugasnya sebagai wanita untuk mengandung dan melahirkan keturunan.

Dengan demikian, pembatasan yang diatur di dalam UUK yang menutup kemungkinan bagi suami istri untuk melanjutkan keturunan melalui *surrogate mother* adalah inkonstitusional serta bertentangan dengan prinsip yang terkandung di dalam HAM, terutama dalam pemenuhan hak sipil bagi setiap orang yang memiliki kondisi khusus untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga di dalam perkawinan yang sah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga telah diatur di dalam pasal 28B ayat (1) UUDNRI 1945, pasal 16 ayat (1) DUHAM, pasal 2 Tap MPR, pasal 10 ayat (1) UU HAM, pasal 23 ayat (1) ICCPR, dan pasal 10 ayat (1) ICESCR. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) keberlangsungan hak asasi bagi setiap orang.
2. Penggunaan istilah sewa rahim sebagai terjemahan dari *surrogate mother* adalah tidak tepat, sebab konstruksi *surrogate mother* berbeda dengan perjanjian sewa menyewa. Oleh karena itu perjanjian ini lebih tepat disebut sebagai perjanjian jasa ibu pengganti. *Surrogate mother* yang dilakukan berdasarkan suatu alasan medis yang mengakibatkan seorang wanita tidak dapat mengandung dan melahirkan keturunan merupakan tindakan yang dapat diterima atau sah baik secara medis maupun hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aries Harianto, **Ringkasan Disertasi: Makna “Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja”**, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Agnes Sri Rahayu, **Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009.

Desriza Ratman, **Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

Evelyn Billings, *et.al.*, **Metode Ovulasi Billings**, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

Jackson Brown, *A Book Of Love For My Son*, Rutledge Hill Press, Nashville, 2001.

John M. Echols, *et.al.* **Kamus Inggris Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

General Comments International Covenant on Civil and Political Rights.

Salim H.S., **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Universal Declaration of Human Rights, 1948.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provision in the International Covenant on Civil and Political Rights 1984.

Vienna Declaration and Programme of Action, 1993.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 164/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor: PUT-09-K/PM I-07 AD/III/2011.

Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 169-K/PM.III-12/AD/VII/2012.

